

**KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL
DALAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Charles Irving Christian Pasaribu
NPP. 29.1059

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: cicp031200@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the increasing number of homeless people and beggars in East Kotawaringin Regency, especially in Sampit City which causes disturbances to peace and public order. **Objective:** The purpose of this study was to explain the components of organizational collaboration carried out by the Civil Service Police Unit with the Social Service in empowering homeless people and beggars in East Kotawaringin Regency. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that (1) The research shows that the components of collaboration include: Face-to-face dialogues such as meetings or meetings have not gone well because many are not present. Build trust in expressing opinions and helping each other and complying with all agreed rules. Commitment to a collaborative process where every agency involved is able to take responsibility for their duties and obligations. Shared understanding, although the vision and mission are not the same but have the same goal. The temporary impact has increased on the empowerment of the homeless and beggars through several programs. (2) The supporting factors for the collaboration component are the existence of policies regarding the handling of homeless people and beggars, the provision of assistance and training and a strong commitment, while the inhibiting factors for the collaboration component are the lack of human resources from each agency involved and the insufficient budget. **Conclusion:** the conclusion in this study is the collaboration carried out by the Civil Service Police Unit and also the Social Service has been going well even though there are problems that hinder the inadequate human resources.

Keywords: *Organizational Collaboration, Empowerment (homeless and beggars)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di Kota Sampit yang menyebabkan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen kolaborasi organisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penelitian menunjukkan bahwa komponen kolaborasi diantaranya: Dialog tatap-muka yang dilakukan seperti pertemuan atau rapat belum berjalan dengan baik karena banyak yang tidak hadir. Membangun kepercayaan dalam menyampaikan pendapat serta saling membantu dan mematuhi segala aturan yang telah disepakati. Komitmen pada proses kolaborasi dimana setiap instansi yang terlibat mampu bertanggung jawab pada tugas dan kewajibannya. Pemahaman bersama, walaupun visi dan misi tidak sama tetapi memiliki tujuan yang sama. Dampak sementara telah mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui beberapa program. (2) Faktor pendukung komponen kolaborasi yaitu adanya kebijakan tentang penanganan gelandangan dan pengemis, pemberian bantuan dan pelatihan dan adanya komitmen yang kuat, sedangkan faktor penghambat komponen kolaborasi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dari setiap instansi yang terlibat serta anggaran yang kurang mencukupi. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Dinas sosial sudah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan yang menghambat pada sumber daya manusia yang belum mencukupi.

Kata kunci: *Kolaborasi Organisasi, Pemberdayaan (gelandangan dan pengemis)*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan yang membutuhkan usaha keras untuk memberantasnya. Kemiskinan ini erat kaitannya dengan keseharian bahkan dominasi nenek moyang kita. Namun, hal ini berbeda dengan kemiskinan kultural, yang dimanifestasikan dengan sikap malas dan pasrah terhadap nasib, seperti yang sering terjadi pada gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis sering digunakan singkatan yaitu gepeng. Kemiskinan yang terus menyerang gepeng ialah sesuatu tradisi yang tidak baik buat diteruskan pada kanak-kanak mereka nantinya. Tetapi, dengan alibi keterbatasan ekonomi keluarga, pengemis serta gelandangan rela melaksanakan upaya apapun demi memperoleh pemasukan, walaupun dengan metode yang tidak pas serta memperkenalkan keresahan untuk masyarakat dekat. Tidak hanya dengan metode memintaminta, banyak gelandangan serta pengemis menempuh rutinitas dengan jalur melaksanakan penipuan, perampokan serta lain sebagainya. Hal-hal yang membolehkan bisa meresahkan warga dengan kegiatan yang dicoba oleh gepeng menjadikan penindakan gepeng ialah program yang semestinya lekas dilaksanakan dengan kilat. Kemunculan gelandangan serta pengemis di tengah-tengah warga pastinya didukung oleh sebagian aspek. Faktor-faktor kemunculan gepeng ialah sesuatu bekal buat kajian yang kokoh atas penanggulangan gelandangan serta pengemis, sehingga bisa didatangkan model penindakan yang pas dalam wujud sesuatu model pencerahan buat mengatasi bertambahnya gelandangan serta pengemis dalam jangka panjang. Disisi lain di Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kesusahan sendiri sehingga tidak senantiasa mendatangkan kepastian hendak kehidupan yang lebih baik untuk para pelakon urbanisasi. Perihal ini disebabkan kehidupan lebih baik yang dimaknai oleh para pelakon urbanisasi selaku kesejahteraan cuma terpaut kekayaan semata tanpa memandang kesusahan yang lebih jauh. Kabupaten Kotawaringin Timur selalu dilenggengkan oleh urbanisasi selaku stigma yang dengan penuh kemajuan tanpa sempat memandang desa dalam kompleksitasnya sendiri. a dari tahun 2014 hingga tahun 2020 jumlah gelandangan dan

pengemis mengalami peningkatan. Jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan tetapi mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni pada Tahun 2014 sebanyak 32 orang menjadi 53 orang pada Tahun 2020.

Peningkatan angka gelandangan dan pengemis tersebut jika tidak segera diatasi maka akan menimbulkan masalah lainnya yang akan timbul serta timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam perihal ini pemerintah sudah merancang kebijakan buat mengentaskan kasus menimpa gelandangan serta pengemis, baik dari pemerintah pusat hingga ke wilayah. Perihal itu bisa dilihat dari realitas kalau nyaris di segala kabupaten ataupun kota di Indonesia mempunyai kebijakan terpaut dengan gelandangan serta pengemis, tercantum di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peran aparatur pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur harus ada upaya untuk menangani banyaknya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena itu dibutuhkan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial untuk menertibkan dan memberdayakan gelandangan dan pengemis tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin menggali dan mempelajari lebih dalam lagi dan melakukan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Jumlah penduduk desa terus menjadi meningkat menimbulkan perpindahan penduduk di desa ke kota-kota (urbanisasi) buat memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang lebih layak, namun pada realitasnya kemudahan yang diharapkan kala perpindahan penduduk desa ke kota yang menginginkan kehidupan yang lebih layak malah membuahkan kesusahan, yang kesimpulannya para penduduk desa yang tidak memperhitungkan keahlian diri dapat saja jadi seseorang pengemis, gelandangan, serta orang terlantar, sebab kenaikan pemasukan di kota tidak menjamin kenaikan kesejahteraan pula (Purwanti, 2004: 148). Sehingga kesenjangan disini tergambar pada harapan bahwa kota besar akan memberikan peluang terhadap kehidupan, malah sebaliknya menimbulkan kehidupan yang makin tidak pasti dan mengekang. Hal tersebutlah yang menimbulkan kesenjangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan daerah yang sangat strategis dalam berbagai sektor mulai dari perkebunan, perikanan, perindustrian, dan lain-lain yang membuat masyarakat dari luar daerah berdatangan untuk mencari pekerjaan. Tentunya, persaingan dalam memperebutkan agar dapat mendapatkan pekerjaan juga semakin ketat. Tidak sedikit dari mereka yaitu masyarakat dari luar pulau yang tidak memperoleh pekerjaan yang kemudian terlantar di tengah perkotaan karena tidak memiliki cukup biaya untuk kembali ke daerah asal mereka dan akhirnya sebagian besar dari mereka banyak yang memilih menjadi seorang gelandangan dan pengemis. Hal tersebut jelas saja akan menimbulkan gangguan stabilitas, menghambat pembangunan nasional dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta berbagai permasalahan lainnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu dari hal teori yang digunakan, maupun dari teman yang diangkat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai pedoman dan juga patokan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama yang dijadikan

acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Akbar, 2019**) yang berjudul Kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa dan Masyarakat Adat Dalam Pelestarian di Kawasan Pariwisata Benteng Somba Opu dengan metode penelitian fenomenologi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menerangkan bahwa kolaborasi Dinas Kebudayaan dengan masyarakat adat dalam pelestarian kawasan benteng somba opu di Kabupaten Gowa ini kolaborasinya baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Dengan beberapa indikator: 1. Partisipasi (yang merupakan alat dimana warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian kawasan Benteng Somba Opu, 2. Akseptasi (untuk melestarikan perilaku pribadi dengan kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi), 3. Komunikasi (adalah suatu kunci utama kolaborasi berjalan dengan baik sehingga pelestarian kawasan Benteng Somba Opu terjalin). Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Jihad, 2020**) yang berjudul “Kolaborasi Antar Masyarakat dan Pemerintah Dalam Mengelola Program Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor” dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara warga serta pemerintah dalam mengelola program PAMSIMAS dalam wujud Codetermination telah berjalan secara efisien serta efektif, perihal ini diisyaratkan dengan terdapatnya sosialisasi serta pembuatan Kelompok Keswadayaan Warga (KKM) yang berikutnya melaksanakan pelatihan buat menciptakan pemecahan serta menanggulangi permasalahan yang mencuat secara totalitas terpaut pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (**Septiani dkk, 2021**) yang berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Utara” dengan metode penelitian fenomenologi dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bersumber pada hasil observasi, wawancara serta analisis hingga kesimpulan dari aspek pendukung proses kerja sama dalam pengelolaan ruang terbuka ialah: (a) aspek struktur sosial, terdapatnya ikatan silih yakin, silih menyadari akan setiap tugas serta guna tiap-tiap stakeholder dalam mengelola ruang terbuka. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Febriani, 2019**) yang berjudul “Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik” dengan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam proteksi serta pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik hendak namun belum intensif sebab kala rapat dilaksanakan tidak seluruh organisasi yang ikut serta bisa muncul di perjumpaan itu dan informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Arfin dan Rifdan, 2021**) yang berjudul Implementasi Collaborative Government Dalam Penanganan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi collaborative government dalam penanganan pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar pada aspek sosialisasi sudah efektif, meskipun ditemukan bahwa tujuan dan manfaat implementasi collaborative government yang diterapkan masih kurang optimal dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup yang layak dan sejahtera bagi pengamen yang ditertibkan dan dibina. Koordinasi antara pihak internal dengan pihak Satpol PP dan Kepolisian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun demikian, masih ditemukan ketidakefektifan dalam menindaklanjuti warga masyarakat yang bertindak anarkis terhadap anggota yang melakukan penertiban bagi pengamen serta warga masyarakat yang masih memberikan hadiah atau uang kepada pengamen di jalanan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menunjukkan kebaruan dari penelitian yang akan dilaksanakan seperti lokasi penelitian yang akan dilaksanakan menunjukkan tempat yang berbeda yang artinya tingkat kompleksitas permasalahan yang berbeda sehingga perlu dilaksanakan penelitian kembali. Seperti contohnya adalah penelitian (Akbar, 2019) yang melaksanakan penelitian di Kabupaten Gowa, lalu ada penelitian (Jihad, 2020) yang berlokasi di Kabupaten Alor, selanjutnya adalah penelitian (Septiani dkk, 2021) yang bertempat penelitian di Kabupaten Luwu Utara dan penelitian (Arfin dan Rifdan, 2021) yang melakukan penelitian di Kota Makassar, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten Kotawaringin timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya adalah kebaruan tentang metode penelitian yang digunakan yang ditunjukkan oleh penelitian (Akbar, 2019) dan juga penelitian (Septiani dkk, 2021) yang dalam menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode penelitian fenomenologi dengan metode kualitatif, sedangkan penulis menggunakan cara yang sedikit berbeda yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai komponen kolaborasi organisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur beserta jajarannya. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori **Kolaborasi** yang dikemukakan oleh Ansell & Gash Tahun 2007). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Pelaksanaan Komponen Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur.

a) Dialog tatap muka, face to face dialogue (dialog tatap-muka) kolaborasi institusi pada pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial, dibutuhkan indikator yakni sebagai berikut: 1. Komunikasi menunjukkan bahwa semasa ini kesibukan yang terjalankan telah berjalan dengan bagus, tapi masih terpendam beberapa bagian yang perlu dikoreksi ialah tentang perjumpaan yang belum insentif serta pertemuan yang tidak terjadwal. 2. Musyawarah menunjukkan bahwa musyawarah merupakan suatu yang berpengaruh untuk dilakukan, namun sebelum semua instansi yang terlibat melakukan musyawarah lebih dahulu mengajak musyawarah dengan instansi yang terlibat untuk membahas bagaimana prosedur pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial. 3. Keterbukaan yang menunjukan bahwa tiap organisasi yang terlibat saling jujur khususnya saat terdapat informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan gelandangan dan pengemis, tidak ada diskriminasi yang ada pada kolaborasi dikarenakan tiap instansi sudah punya tugas sendiri-sendiri dalam kegiatannya.

b) Membangun Kepercayaan, merupakan salah satu alasan yang dibutuhkan untuk menjalin kolaborasi yang rekat. 1. Empati, perilaku empati dalam pemberdayaan gelandangan serta pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur ialah keahlian buat mengenali serta menguasai secara realita sikap lembaga yang terpaut semacam kepekaan antar organisasi, tidak mengedepankan kepentingan individu dan melaksanakan penilaian diri buat menggapai suksesnya pemberdayaan sehingga sanggup menyelesaikan sesuatu kasus secara efisien. 2. Kredibilitas, tugas yang menekan lembaga terpaut wajib senantiasa siap buat menanganinya, sumbangsih dicoba bersumber pada tugas tiap lembaga. 3. Kedekatan sosial, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Sosial melaksanakan ikatan emosional dengan menghadiri Kantor tiap lembaga yang ikut serta.

c) Komitmen pada Kolaborasi, Komitmen ialah komponen yang sangat berarti dalam proses kerja sama. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kerja sama. Tiap-tiap aktor wajib mempunyai komitmen serta kemauan yang kokoh buat menyelesaikan tugas serta tanggung jawab tiap- tiap bersumber pada konvensi yang sudah diputuskan secara bersama. 1. Pengakuan, komitmen didalam pemberdayaan gelandangan serta pengemis sangat dominan melakukan tugas tiap-tiap, meski tidak terdapat ketentuan ataupun perjanjian yang disepakati tadinya namun kepercayaan hatilah yang membuat sanggup komitmen terhadap apa yang dicoba. 2. Apresiasi, Permasalahan ataupun kepentingan bersama jadi sumber inspirasi serta motivasi untuk berkembangnya kerja sama antara organisasi publik serta organisasi mitranya di zona privat. 3. Monitoring, Monitoring dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Dinas Sosial dalam kolaborasi. Mereka bertugas melihat serta menandai 94 dimana titik-titik gelandangan dan pengemis sering dijumpai yang nantinya akan diamankan dan kemudian akan diberdayakan di Dinas Sosial.

d) Pemahaman Bersama, ialah perihal yang berarti dalam menggapai tujuan bersama. Uraian bersama bisa dimaksud selaku misi universal, tujuan universal, obyektivitas universal serta visi bersama. 1. Visi dan misi, kesamaan visi dan misi tidak ada tetapi visi dan misi setiap instansi yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan gelandangan dan pengemis harus tetap terwujud. 2. Tujuan, n ialah perihal yang berarti dalam kerja sama sebab tujuan ialah sasaran yang wajib dicapai dalam kerja sama sehingga wajib terdapat tujuan yang disepakati tadinya, dimana tujuannya ialah buat

melaksanakan pemberdayaan terhadap gelandangan serta pengemis sehingga sanggup tingkatan kesejahteraan hidup mereka nantinya sehabis diberdayakan.

e) Dampak Sementara, Dampak sementara berjalan semasa jalannya kolaborasi, dengan demikian jelas kata “sementara” di kalimatnya. Dampak sementara menciptakan suap-balik yang dicita-citakan yakni suap-balik yang positif, yang istilahnya “small-wins” (kemenangan kecil). Kabupaten Kotawaringin Timur sudah mengalami perubahan terhadap pemberdayaan gelandangan dan pengemis dengan optimal, peran berbagai instansi yang terlibat menjadi faktor terpenting dalam melakukan interaksi dengan instansi lainnya. Kontribusi ini digiatkan, antara lain supaya memperoleh sumber-sumber berasal luar namun dengan beberapa pertimbangan yang masak seperti bantuan dari modal usaha, pelatihan pengembangan bakat dari berbagai pemberi. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan individu, kelompok dan objek program kegiatan seperti menyokong usaha implementasi program dan berusaha merealisasikan program itu.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur.

a) Faktor Pendukung, Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial mampu merealisasikan kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Karena kedua instansi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya adalah pemberian fasilitas tersebut diharapkan gelandangan dan pengemis mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Lalu ada Komitmen yang kuat merupakan faktor penting dalam kolaborasi, tanpa adanya komitmen dari masing-masing instansi maka kolaborasi tidak akan dapat berjalan serta tidak bisa tercapai tujuan kolaborasi itu sendiri.

b) Faktor Penghambat, Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial sebenarnya sudah banyak akan tetapi masih kurang. Lalu ada Pemerintah masih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memperhitungkan kembali anggaran yang diberikan guna untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis. Kurangnya anggaran dari Pemerintah akan mempersulit untuk menjalankan proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial sesungguhnya kolaborasi yang dilaksanakan dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis dari aspek tatap-muka tidak terjadwal tetapi jika diperlukan akan segera melaksanakan pertemuan tersebut. Dari penjelasan kedua informan tersebut tersirat bahwasanya semasa ini kesibukan yang dijalankan telah berjalan dengan bagus, tapi masih terpendam beberapa bagian yang perlu dikoreksi ialah tentang perjumpaan yang belum insentif serta pertemuan yang tidak terjadwal. Disini ditemukan bawasannya komunikasi yang dibangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan SOP yang ada. Ini merupakan temuan yang sangat menarik untuk didiskusikan karena tugas dari Satpol PP adalah penegakan Perda dan Perkada, tetapi dalam mematuhi SOP koordinasi saja sudah dilanggar dan menimbulkan keambiguan dalam pelaksanaan pertemuan, sehingga akan mempengaruhi dari kualitas kolaborasi dan juga permasalahan yang timbul setiap bulannya dapat terlewatkan begitu saja.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa pemberdayaan gelandangan dan pengemis sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum intensif karena ketika ada pertemuan atau rapat tidak semua perangkat dari setiap instansi dapat hadir di rapat itu maka komunikasi pun jadi tak tersampaikan dengan jelas. Setiap instansi yang terlibat dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis mampu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu meningkatkan keterampilan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di Kota Sampit. Saran atau masukan agar pemerintah lebih memperhatikan lagi gelandangan dan pengemis: 1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hal mengenai anggaran yang harusnya lebih baik lagi, agar setiap pelaksanaan program kolaborasi pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis dapat berjalan lebih baik lagi. 2. Semua pihak yang terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sebaiknya memperlakukan para gelandangan dan pengemis sebagai manusia normal sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi yang mereka rasakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Kolaborasi Satpol PP dan juga Dinas Sosial kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Kolaborasi Satpol PP dan Dinas sosial dalam Penertiban gelandangan, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. & Gash, A (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 18, No.4 (Oct. 2008).
- Daulay, Habib. (2019). *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi*.
- Fairuza, Mia. (2017). *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 5, Nomor 3, September-Desember 2017, ISSN 2303-341X.
- Ishak, Khodijah. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan di Indonesia*.
- Jihad, Mohamad. (2020). *Kolaborasi Antara Masyarakat dan Pemerintah Dalam Mengelola Program Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor*. Skripsi UMM Makassar 2020.
- Lahmi, Khairul. (2014). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi*.
- Priyantoro, Norika. (2015). *Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif (UIN Sunan*

- Kalijaga*). Skripsi UIN Kalijaga 2015.
- Tanjung, Akbar. (2019). *Kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa Dengan Masyarakat Adat Dalam Pelestarian di Kawasan Pariwisata Benteng Somba Opu*. Skripsi UMM Makassar 2019.
- Wulandari, Febriani. (2019). *Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone*. Skripsi UMM Makassar 2019.

